

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara 2010-2021

Aprilia Hutagaol¹ Joko Suharianto² Senta Rina Damanik³ Kezia Br Aritonang⁴
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: liahutagaol669@gmail.com¹ djoko@unimed.ac.id² sentarina02@gmail.com³
keziaarios0907@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menunjukkan sejauh mana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi kualitas Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2010-2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis linear berganda dengan bantuan alat analisis software Eviews 12 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan adalah data series selama periode 2010-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Variabel dana alokasi khusus dan dana alokasi umum secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Sebesar 93.55% variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh variabel independen yaitu dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya sebesar 6.45% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini

Kata Kunci: IPM, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

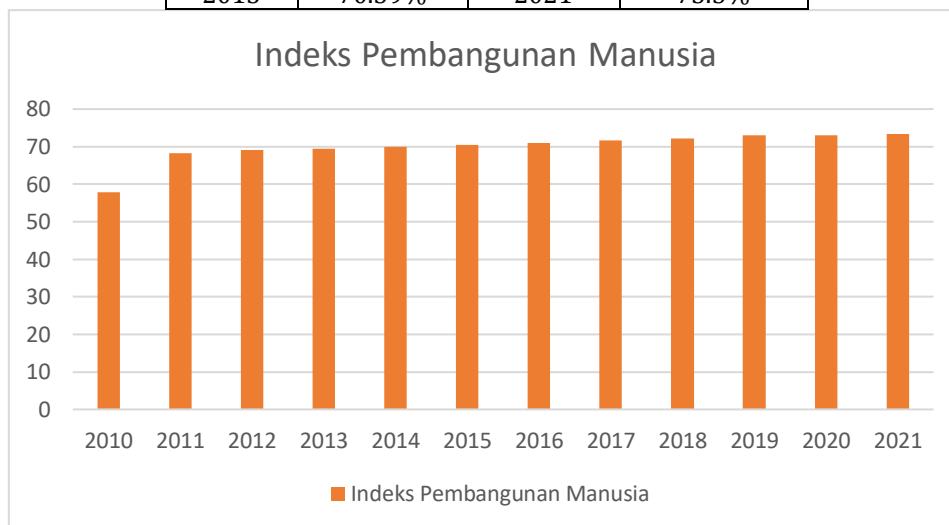
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 (UU RI) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan, otonomi daerah berlaku di Indonesia transfer uang antara pemerintah pusat dan daerah namun berhasil dipraktikkan pada awal tahun 2001 UU Ini sedang diperbarui seiring perkembangannya penerbitan UU. dan UU No.32 Tahun 2004 Nomor 33 Tahun 2004). Digunakan pengelolaan pemerintah pusat, desentralisasi. Melalui APBN, daerah mendapat pembayaran perimbangan yang hakikatnya transfer. Fungsi didahulukan sebelum uang, khususnya gagasan di mana fungsi ditetapkan pada awalnya, kemudian memastikan sejauh mana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan hal-hal yang relevan. Otonomi daerah dipandang lebih demokratis dan mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya karena masing-masing daerah dapat lebih leluasa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya (Wertianti, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh PBB Development Program (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul Laporan Pembangunan Manusia. Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapita, UNDP mendefinisikan IPM sebagai suatu proses memperbesar pilihan masyarakat atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Menurut BPS (2009), IPM adalah ukuran pencapaian pembangunan didasarkan sejumlah komponen dasar dari kualitas hidup. Laporan Pembangunan Manusia (1990) menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses yang mencerminkan keragaman pilihan manusia ("Suatu proses

memperbesar orang”). Dari definisi tersebut jelas bahwa fokus pembangunan suatu bangsa adalah warga negaranya karena mewakili kearifan suatu bangsa. Teori ekonomi mengajukan hipotesis investasi modal manusia, yang didefinisikan sebagai kapasitas produksi energi manusia selama proses pembangunan. Nilai IPM suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan- kebijakan internal pemerintah daerah. Kebijakankebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembagunan manusia, sejatinya dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sector pendidikan dan kesehatan (Arsyad, 2010). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, membuat daerah mampu membiayai dan memenuhi keperluan yang diharapkan masyarakat (Christy dan Adi, 2009). IPM telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan: Sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan, dan Sebagai alternatif untuk PDB per kapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan antar negara dan waktu (Elizabeth, 2007).

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2021

Tahun	IPM	Tahun	IPM
2010	67.83%	2016	71.05%
2011	68.31%	2017	71.66%
2012	69.04%	2018	72.2%
2013	69.49%	2019	72.99%
2014	69.96%	2020	72.93%
2015	70.39%	2021	73.3%



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Dari grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi utara di atas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2021 semakin meningkat. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara tahun 2021 mencapai 73,30 atau tumbuh 0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 72,93. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara menunjukkan posisi pertama di pulau Sulawesi. Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. Indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara naik dari 67,83 pada tahun 2010 menjadi 72,99 pada tahun 2019 dengan kategori tinggi. Pada tahun 2020 menurun jadi angka 72,93 dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 73,30. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara ini tentunya di sebabkan oleh berbagai faktor. Seperti kondisi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan yang layak. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah dua sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam

mendukung berbagai program pembangunan, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Salah satu Dana Perimbangan yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui anggaran transfer adalah Dana Alokasi Umum. Transfer ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) transfer tanpa syarat (seperti hibah bertujuan umum, hibah blok, dan hibah tanpa syarat); dan (2) transfer dengan persyaratan (tujuan tertentu, kategori, dan hibah bersyarat). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAU berdampak pada pemerataan horizontal (horizontal pemerataan), yaitu mengurangi selisih pengeluaran antara potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan keuangan daerah. Bantuan Tanpa Syarat Tanpa Syarat (DAU) (hibah tanpa syarat), karena DAU merupakan bentuk transfer yang terjadi antar tingkat pemerintahan dan bukan merupakan bentuk transfer terkait dengan inisiatif pembelanjaan tertentu.

Jika dana tersedia, pertumbuhan DAU menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dinilai oleh IPM. Ditugaskan ke beberapa tujuan. Hal ini misalnya dapat meningkatkan IPM. Dana Alokasi Umum (DAU) diambil dari pusat adalah membagikan uang dengan suatu tujuan kebutuhan pendanaan dan biaya daerah dalam kerangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah bisa memberikan masyarakat pelayanan lebih baik dengan dana ini sehingga meningkatkan kualitas, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup sehat dan harapan hidup yang lebih (Harahap, 2011). Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU digunakan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diatur pemerintah pusat dengan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan daerah kepada masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya DAU tersebut bermuara juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana ketika kesejahteraan masyarakat meningkat maka juga akan meningkatkan angka IPM pada daerah tersebut.

Tabel 2. Perkembangan Dana Alokasi Umum dan IPM Sulawesi Utara Tahun 2010-2021

Tahun	IPM	Dana Alokasi Umum	Tahun	IPM	Dana Alokasi Umum
2010	67.83%	558781013	2016	71.05%	1065545204
2011	68.31%	619711007	2017	71.66%	1390272639
2012	69.04%	790534491	2018	72.2%	1427544997
2013	69.49%	885684277	2019	72.99%	1463436158
2014	69.96%	949852622	2020	72.93%	1335813209
2015	70.39%	1026948809	2021	73.3%	1330463660

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Dana alokasi umum adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan indeks pembangunan manusia. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Sehingga dengan adanya peningkatan Dana Alokasi Umum dapat membantu perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada suatu daerah. Berdasarkan data tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 Dana alokasi Umum menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1335813209 di tahun 2020 menjadi 1330463660, akan tetapi angka indeks pembangunan manusia meningkat di tahun 2021 sebesar 73,3%

Legrenzi & Milas (2001) menemukan bukti empiris dalam Abdullah dan Halim (2003) bahwa transfer jangka panjang berdampak pada Investasi modal dan penurunan jumlah transfer dapat menyebabkan pengeluaran menurun menginvestasikan uang. Prakoso (2004) menemukan data aktual yang menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran Dana Alokasi umum

berdampak pada permodalan. diperoleh dari pemerintah pusat. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah pusat, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transparan dengan prinsip *money follows function*, yaitu prinsip dimana fungsi-fungsi di tentukan terlebih dahulu, barulah ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksanaan urusan bersangkutan (Simandjuntak, 2002). Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan ini berarti bahwa DAU adalah *general purpose grant* dimana daerah berhak menentukan sendiri penggunaan alokasi dana yang mereka terima dari pemerintah pusat tersebut (Brojonegoro, 2002)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah uang yang diambil dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendukung inisiatif unik yang sejalan dengan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Upaya bantuan untuk daerah diprioritaskan. Memiliki kapasitas keuangan di bawah rata-rata nasional, untuk membiayai inisiatif pembangunan infrastruktur dan fasilitas fisik untuk layanan penting masyarakat, yang merupakan masalah wilayah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang digunakan untuk kebutuhan daerah pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk mendanai kegiatan khusus pemerintah daerah yang menjadi prioritas bagi pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengalokasikan ini melalui pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat terkait ketiga faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian IPM setiap tahunnya.

Tabel 3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus dan IPM Sulawesi Utara Tahun 2010-2021

Tahun	IPM	Dana Alokasi Khusus	Tahun	IPM	Dana Alokasi Khusus
2010	67.83%	17439200	2016	71.05%	712639625
2011	68.31%	29288200	2017	71.66%	1008208366
2012	69.04%	43539930	2018	72.2%	956923256
2013	69.49%	54346140	2019	72.99%	1044216781
2014	69.96%	59675060	2020	72.93%	1070673532
2015	70.39%	76744790	2021	73.3%	986679059

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa peningkatan maupun penurunan Dana Alokasi Khusus tidak selalu diikuti oleh peningkatan dan penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2018 Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan menjadi 956923256 akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan menjadi 72,2%. Sedangkan pada tahun 2020 Dana Alokasi Khusus meningkat menjadi 1070673532 dan Indeks Pembangunan Manusia menurun menjadi 72,93%.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pembangunan jalan, rumah sakit, sistem irigasi, dan sumber air bersih guna meningkatkan pelayanan publik. Karena penggunaannya, DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan. menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan yang akan meningkatkan standar pelayanan public infrastruktur dan fasilitas umum (Ndadari dan Adi, 2008). Pemerintah daerah menggunakan DAK untuk belanja modal saja. Aset tetap kemudian disediakan melalui belanja modal. Berdasarkan apa yang dikatakan Abdullah dan Halim (2004) Aktiva tetap yang diperoleh melalui belanja modal adalah persyaratan utama bagi pemerintah daerah untuk menawarkan layanan publik. Lebih lanjut lagi Menurut Abdullah dan Halim (2006), pemerintahan daerah biasanya Membeli aset tetap sesuai dengan prioritas layanan dan anggaran publik, yang memiliki dampak keuangan dari

waktu ke waktu Menurut Abimanyu (2005) yang dikutip oleh Harianto dan Adi (2007) infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sunarno juga menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka desentralisasi untuk pembangunan berdasarkan prioritas nasional serta kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah (Sunarno, 2016)

Berdasarkan data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, DAU, dan DAK Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2021 memperlihatkan bahwa peningkatan maupun penurunan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di tahun tertentu tidak selalu diikuti oleh peningkatan dan penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, sebab seperti yang kita ketahui bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah dua sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2021 untuk mengetahui sejauh mana kedua dana tersebut mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Tinjauan Teoritis

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator global mengenai angka harapan hidup, buta huruf, pendidikan, dan standar hidup yang digunakan untuk semua negara. HDI dipekerjakan di tentukan apakah suatu negara maju, berkembang, atau belum berkembang, dan menilai tingkat pengaruhnya. Pilihan ekonomi yang mempengaruhi standar hidup. Indeks ini dibuat pada tahun 1990, dibuat oleh Mahbub ul Haq dan Amartya Sen, dua peraih Nobel asal India seorang ekonom Pakistan yang bekerja dengan Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Profesor London School of Economics Lord Meghnad Desai, dan kemudian dimanfaatkan oleh laporan tahunan program pembangunan PBB tentang HDI. Diidentifikasi sebagai "Pengukuran vulgar" Amartya Sen karena kekurangannya. Indeks ini lebih sensitif dan praktis dibandingkan pendapatan per kapita yang telah digunakan, dan indeks ini berfungsi sebagai alat yang berguna tautan bagi peneliti yang rajin untuk melanjutkan penyelidikan mereka saat menulis laporan tentang pertumbuhan manusia. HDI menghitung pencapaian rata-rata suatu negara berdasarkan 3 dimensi mendasar pertumbuhan manusia, umur panjang dan sehat yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup sejak lahir. Kemahiran membaca dan menulis masyarakat dijadikan sebagai indikator pengetahuan orang dewasa (dua pertiga dari berat badan) dan campuran sekolah dasar, titik tengah, lebih tinggi dari sepertiga berat rasio partisipasi kasar. PDB bruto per kapita merupakan indikator yang baik mengenai standar hidup yang wajar. Kesetaraan daya beli produk dalam negeri dan produk domestik bruto paritas daya beli dalam dolar AS.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikenal dengan istilah dana alokasi umum. Dana ini kemudian digunakan untuk menyeimbangkan anggaran daerah guna memenuhi kebutuhan daerah sekaligus melaksanakan desentralisasi. No.55, kebijakan pemerintah karena DAU merupakan Block Grant yang dibentuk pada tahun 2005, maka seluruh dana yang dialokasikan berasal dari daerah mendapatkan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah yang berada di dalamnya inisiatif peningkatan pelayanan masyarakat sekaligus pemberlakuan otonomi daerah (Azis, 2014). Nantinya, DAU akan digunakan untuk menghilangkan ketimpangan infrastruktur yang ada saat ini mencapai

pemerataan pembangunan di segala bidang. (Dewi & Suputra, 2017). Pusat dan Daerah kini memiliki perimbangan keuangan dengan program bagi hasil yang menghilangkan perbedaan tuntutan keuangan dan pengendalian pajak di antara keduanya. Dari sisi Pendapatan Dalam Negeri, Dana Alokasi Umum (DAU) mewakili paling sedikit 25%. Dari penerimaan dalam negeri, khususnya dari DAU, akan ditawarkan jaminan bagi Daerah dalam mencari sumber pendanaan mendanai pengeluaran-pengeluaran penting yang menjadi tanggung jawabnya. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam konteks kajian Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah berasal dari APBN dan dikirim ke daerah untuk membantu memodifikasi kebutuhan khusus. Pengalokasian Dakshina dimulai dengan empati dana tersedianya di APBN. DAK disajikan dengan cara yang pemindah bukuan rekening kas global ke rekening kas global. Oleh karena itu, DAK dibahas dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk memuat penyelenggaraan kegiatan, persiapan aktivitas fisik, penelitian, pengajaran, dan dinas perjalanan. DAK ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2004) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2006) menjelaskan bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Menurut Abimanyu (2005) yang dikutip oleh Harianto dan Adi (2007) infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan antara variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data time series yaitu dari tahun 2010-2021 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Indeks Pembangunan Manusia didapatkan dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (x_1) dan Dana Alokasi Khusus (x_2), variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Berikut akan dijelaskan definisi variabel-variabel tersebut.

- a. Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan total dana transfer yang bersifat umum dalam mengatasi masalah ketimpangan antar daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan skala rasio.
- b. Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

c. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak di Provinsi Sulawesi Utara

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis linier berganda dengan bantuan alat analisis software Eviews 12 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis regresi linier berganda ditunjukkan dalam perumusan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = Bilangan Konstan

β_1 = Koefisien Regresi Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

β_2 = Koefisien Regresi Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

X_1 = Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

X_2 = Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subjek dalam penelitian ini adalah provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 sampai 2021 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

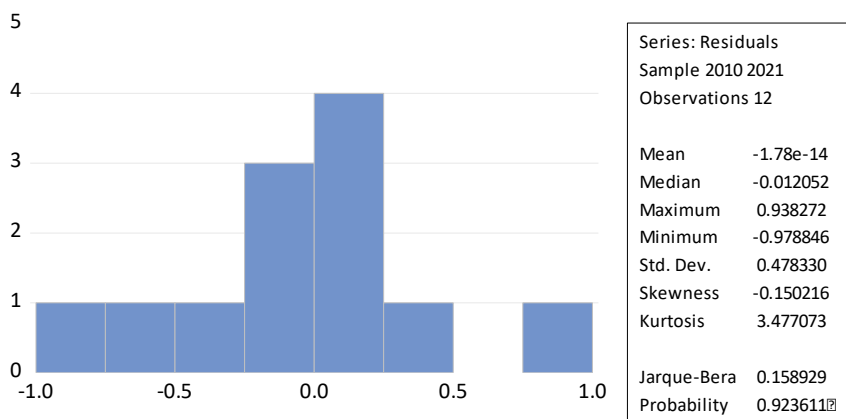
Tabel 4. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010-2021

Tahun	IPM	DAU	DAK	Tahun	IPM	DAU	DAK
2010	67.83%	558781013	17439200	2016	71.05%	1065545204	712639625
2011	68.31%	619711007	29288200	2017	71.66%	1390272639	1008208366
2012	69.04%	790534491	43359930	2018	72.2%	1427544997	956923256
2013	69.49%	885684277	54346140	2019	72.99%	1463436158	1044216781
2014	69.96%	949852622	59675060	2020	72.93%	1335813209	1070673532
2015	70.39%	1026948809	76744790	2021	73.3%	1330463660	986679059

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai Probability Jarque-Bera sebesar 0.923611(>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (lolos uji normalitas).

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/19/23 Time: 16:04			
Sample: 2010 2021			
Included observations: 12			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	0.941730	40.41120	NA
Dana alokasi khusus	6.46E-19	13.09741	6.022123
Dana alokasi umum	1.51E-18	80.19947	6.022123

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai VIF variabel independen sebesar 6.02 <10.00 maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinieritas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.410164	Prob. F(2,9)	0.1451
Obs*R-squared	4.185425	Prob. Chi-Square(2)	0.1234
Scaled explained SS	2.915888	Prob. Chi-Square(2)	0.2327

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai probability obs*R-Squared sebesar 0.1234 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau sudah lolos uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.746550	Prob. F(2,7)	0.1317
Obs*R-squared	5.276289	Prob. Chi-Square(2)	0.0715

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai probability obs*R-Squared sebesar 0.0715(>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

Uji T

Dependent Variable: IPM				
Method: Least Squares				
Date: 11/19/23 Time: 16:00				
Sample: 2010 2021				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.68139	0.970428	67.68294	0.0000
Dana alokasi khusus	1.02E-09	8.04E-10	1.263450	0.2382
Dana alokasi umum	4.27E-09	1.23E-09	3.474451	0.0070
R-squared	0.935527	Mean dependent var		70.76250
Adjusted R-squared	0.921200	S.D. dependent var		1.883822

S.E. of regression	0.528814	Akaike info criterion	1.775958
Sum squared resid	2.516797	Schwarz criterion	1.897184
Log likelihood	-7.655746	Hannan-Quinn criter.	1.731075
F-statistic	65.29696	Durbin-Watson stat	0.872037
Prob(F-statistic)	0.000004		

Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai t-statistic sebesar 3.474451 dan nilai probability sebesar $0.00 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Puji Lestari, Sudati N Sarfiah, dan Panji Kusuma Prasetyanto (2019). Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian, menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan Dana Alokasi Umum yang terjadi sangat berperan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Adanya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia disebabkan oleh pengalokasian difokuskan secara efektif oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia yang lebih baik

Pengaruh Variabel Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t-statistic sebesar 1.263450 dan nilai probability sebesar $0.23 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Puji Lestari, Sudati N Sarfiah, dan Panji Kusuma Prasetyanto (2019). Berdasarkan analisis data dan hipotesis yang dilakukan dalam penelitian, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara ternyata belum mampu meningkatkan maupun mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sulawesi Utara. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara belum memanfaatkan Dana Alokasi Khusus secara efektif dalam upaya pembangunan manusia di daerah tersebut.

Uji F

R-squared	0.935527	Mean dependent var	70.76250
Adjusted R-squared	0.921200	S.D. dependent var	1.883822
S.E. of regression	0.528814	Akaike info criterion	1.775958
Sum squared resid	2.516797	Schwarz criterion	1.897184
Log likelihood	-7.655746	Hannan-Quinn criter.	1.731075
F-statistic	65.29696	Durbin-Watson stat	0.872037
Prob(F-statistic)	0.000004		

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai F-statistik sebesar 65.29696 dengan probabilitas $0.00 < \alpha = 0.05 \%$, artinya variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia.

Koefisien Determinasi

R-squared	0.935527	Mean dependent var	70.76250
Adjusted R-squared	0.921200	S.D. dependent var	1.883822

S.E. of regression	0.528814	Akaike info criterion	1.775958
Sum squared resid	2.516797	Schwarz criterion	1.897184
Log likelihood	-7.655746	Hannan-Quinn criter.	1.731075
F-statistic	65.29696	Durbin-Watson stat	0.872037
Prob(F-statistic)	0.000004		

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.935527, artinya sebesar 93.55% variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya sebesar 6.45% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Tujuan dari riset ini adalah untuk mengukur pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2021. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia dengan nilai t-statistic sebesar 3.474451 dan nilai probability sebesar $0.00 < 0.05$. Sedangkan, variabel Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia dengan nilai t-statistic sebesar 1.263450 dan nilai probability sebesar $0.23 > 0.05$. Variabel DAU dan DAK secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel indeks pembangunan, dengan nilai F-statistik sebesar 65.29696 dengan probabilitas $0.00 < \alpha = 0.05 \%$. Sebesar 93.55% variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh variabel independen yaitu dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya sebesar 6.45% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini

Saran: Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengevaluasi prosedur penyaluran DAK agar dapat mencegah terjadinya perubahan dalam prosedur penyaluran Dana Alokasi Khusus. Kementerian Keuangan dapat menetapkan kebijakan prosedur penyaluran Dana Alokasi Khusus dengan efektif dan efisien agar pelaksanaan DAK di daerah dapat berjalan dengan optimal dan dapat membawa perubahan pembangunan manusia kearah yang lebih baik. Selain itu, Pemerintah Daerah juga sangat berperan dalam mempercepat penyerapan Dana Alokasi Khusus, agar pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan DAK menjadi optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh komponen indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3), 44443.
- Harahap, R. U. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*.
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 100-113.
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (Pad), dana bagi hasil (Dbh), dana alokasi umum (Dau), dan dana alokasi khusus (Dak) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Minahasa Tenggara dengan pengeluaran di bidang kesehatan sebagai variabel intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132-149.

- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1-17.
- Silalahi, S. K., Arief, M., & Indrafana, I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24407-24419.
- Sulastri, E., & Efendri, E. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 85-96.
- Umar, U. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 7(1), 76-96.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044-2070.